

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Meyliana Rachmawati, 1860101223246, ANALISIS LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM (Studi Produk di ‘Tiga Bintang’ Kecamatan Munjungan), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Hiba Fajarwati, S.H., LL.M.

Kata Kunci: Label Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya industri rumah tangga di wilayah pedesaan yang belum melengkapi kemasan produknya sesuai dengan standar regulasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kelengkapan informasi label pangan pada produk ‘Tiga Bintang’ di Kecamatan Munjungan, menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta korelasi fungsi BPJPH, serta membedah praktik pelabelan tersebut dalam Hukum Islam sekaligus memetakan tindakan preventif dan edukatif yang diupayakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Menggunakan metode riset lapangan (*field research*) kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik observasi langsung serta wawancara mendalam bersama pihak pelaku usaha, perwakilan pengurus MUI, pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan masyarakat konsumen, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur regulasi, buku, serta jurnal akademik yang relevan. Hasil penelitian lapangan mengungkap bahwa pengemasan pangan olahan ‘Tiga Bintang’ masih sangat minimalis karena hanya menampilkan stiker nama produk dan harga tanpa menyertakan elemen wajib (*mandatory*) berupa logo sertifikasi halal resmi. Ditinjau dari aspek hukum positif, realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yuridis terhadap prinsip imperatif program Wajib Halal Oktober (WHO) yang dapat memicu sanksi administratif, sekalipun pihak pemerintah melalui BPJPH telah menyediakan kemudahan sertifikasi gratis lewat mekanisme self-declare (SEHATI). Selanjutnya, dalam tinjauan Hukum Islam dan Fatwa MUI, ketiadaan label penjasar tersebut melahirkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat mengaburkan jaminan keamanan pangan dan merugikan konsumen Muslim, serta menandakan belum tegaknya prinsip *Ash-Shidq* (kejujuran), *Al-Bayan* (transparansi), dan *Mas’uliyah* (tanggung jawab) moral dalam berbisnis akibat keterbatasan pemahaman pelaku usaha. Disimpulkan bahwa kemasan produk ‘Tiga Bintang’ belum memenuhi kriteria baku hukum negara maupun syariat. Oleh karena itu, sebagai bentuk pelayanan umat (*khadimul ummah*), pihak MUI setempat secara aktif menjalankan otoritasnya melalui pembinaan persuasif, edukasi etika muamalah, serta memfasilitasi pendampingan pendaftaran sertifikasi halal untuk mewujudkan ekosistem pasar lokal yang aman, jujur, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

ABSTRACT

Meyliana Rachmawati, 1860101223246, ANALYSIS OF HALAL LABELS FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 33 OF 2014 AND ISLAMIC LAW (A Product Study at 'Tiga Bintang' Munjungan District), Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Law Science, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2025, Supervisor Hiba Fajarwati, S.H., LL.M.

Keywords: Halal Label, Law Number 33 of 2014, Islamic Law, MUI.

This research is driven by the phenomenon of household industries in rural areas neglecting product packaging standardization, aiming to assess the completeness of food label information on 'Tiga Bintang' products in Munjungan District, analyze its compliance with the provisions of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH) along with its functional correlation with BPJPH, as well as dissect the practice from the perspective of Islamic Law and map out the preventive-educational measures implemented by the Indonesian Ulema Council (MUI) at both regency and district levels. Utilizing a qualitative-descriptive field research method with an empirical-juridical approach, primary data were gathered through direct observation and in-depth interviews with the business owner, MUI board members, Halal Product Process (PPH) assistants, and local consumers, supplemented by secondary data from statutory regulations, reference books, and academic journals. The field findings reveal that the packaging practice of 'Tiga Bintang' processed food is highly minimalist, only displaying the product name and price on a basic sticker without integrating mandatory components such as the ingredient list, expiration date, P-IRT distribution permit, or an official halal logo. From the standpoint of positive law, this situation indicates a significant legal gap regarding the imperative rules of the October Halal Mandatory (WHO) program, which carries administrative sanctions, despite BPJPH's efforts to facilitate free certification via the self-declare (SEHATI) scheme. Furthermore, under Islamic Law and MUI Fatwas, the absence of explanatory labels triggers a state of *gharar* (uncertainty) that undermines the peace of mind of Muslim consumers and demonstrates a lack of *Ash-Shidq* (honesty), *Al-Bayan* (transparency), and *Mas'uliyah* (responsibility) in business due to the entrepreneur's limited regulatory knowledge. In conclusion, the 'Tiga Bintang' packaging has failed to meet the standardization of both positive law and sharia muamalah; therefore, acting as a public servant (*khadimul ummah*), the local MUI actively exercises its authority through persuasive counseling, business ethics education, and supporting halal registration processes to foster a secure, transparent, and beneficial local market environment.

الملخص

ميليانا راشماواي، ١٨٦٠١٠١٢٣٢٤٦، تحليل ملصق الحلال في منظور القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ والشرعية الإسلامية (دراسة المنتج في 'تيجا بينتائج' بمنطقة مونونجان)، قسم فقه المعاملات كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج (HES)، أجونج، ٢٠٢٥، تحت إشراف المشرفة هبة فجرواوي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: ملصق الحلال، القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤، الشرعية الإسلامية، مجلس العلماء الإندونيسي

البحث إلى تقييم مدى اكتمال معلومات ملصق الغذاء على منتجات "تيجا بينتائج" في منطقة مونونجان، وتحليل مدى توافقها مع أحكام القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات بالإضافة إلى دراسة ممارسة وضع الملصقات من منظور (BPJPH) الحلال وعلاقته الوظيفية بهيئة الفقه الإسلامي وتحديد الخطوات الوقائية والتربوية التي يقوم بها مجلس العلماء الإندونيسي على مستوى المنطقة والمركز. واعتمد البحث على المنهج الميداني الوصفي النوعي (MUI) بالمدخل القانوني التجريبي، حيث جُمعت البيانات الأولية عبر الملاحظة المباشرة والمقابلات المتعمقة (PPH) مع صاحب المشروع، وأعضاء مجلس العلماء الإندونيسي، ومرافقي عملية المنتج الحلال والمستهلكين، مدعومة بالبيانات الثانوية من القوانين والكتب والمجلات العلمية ذات الصلة. وأظهرت نتائج البحث الميداني أن ممارسة وضع الملصقات على عبوات "تيجا بينتائج" لا تزال بسيطة ومحدودة للغاية، حيث تقتصر على ملصق يحتوي فقط على اسم المنتج والسعر دون إدراج شعار الحلال الرسمي الإلزامي. ومن حيث القانون الوضعي، فإن هذا الواقع يكشف عن فجوة قانونية واضحة تعارض المبدأ الإلزامي لبرنامج "وجوب الحلال في أكتوبر" مما قد يعرض المشروع من خلال مسار (BPJPH) لعقوبات إدارية، رغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة عبر هيئة ومن منظور الشرعية الإسلامية وفتاوى مجلس العلماء، فإن (SEHATI) الإقرار الذاتي المجاني

غياب الملصق التوضيحي يؤدي إلى حالة من الغرر التي قد تؤثر على جودة سلامة الأغذية وتضر بالمستهلكين المسلمين، ويعكس عدم التزام المنتج بمبادئ الصدق، والبيان (الشفافية)، والمسؤولية الأخلاقية بسبب ضعف الوعي القانوني لديه. وتوصل البحث إلى خلاصة مفادها أن تغليف منتجات "تيجا بينتانج" لم يستوفِ الشروط الإلزامية قانوناً وشرعاً؛ وتأكيداً على دور مجلس العلماء الإندونيسي المحلي في خدمة الأمة (خادم الأمة)، فإنه يمارس وظيفته بفعالية من خلال التوجيه الوقائي، والتوعية بأخلاقيات المعاملات، وتسهيل مرافقة إجراءات تسجيل شهادات الحلال لبناء سوق محلي آمن، عادل، ومبارك للمجتمع.